

Analisis Literatur: Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Lativa Yuswanita ^{✉1}, Diva Trimuliani², Nur Fadillah Suprayitno³, Kurniawan Harminsyah Baharuddin⁴

^{1,2,3,4} D4 Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Tanah Laut

Abstrak

Laporan keuangan pemerintah memiliki fungsi strategis dalam memastikan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Meskipun demikian, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menunjukkan adanya kelemahan pada sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap regulasi, yang berdampak pada rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaruh penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap mutu laporan keuangan, mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya, serta menganalisis kaitan antara tingkat maturitas SPIP dengan opini audit BPK. Kajian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap sepuluh sumber ilmiah dan laporan resmi terbitan tahun 2020–2025. Hasil studi menunjukkan bahwa penerapan SPIP berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, terutama dari sisi relevansi, keandalan, dan penyajian yang wajar. Efektivitas SPIP dipengaruhi oleh kompetensi aparatur, komitmen pimpinan, budaya organisasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Sebaliknya, penerapan SPIP yang hanya bersifat administratif belum memberikan dampak nyata terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, peningkatan tingkat maturitas SPIP berkorelasi positif dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Dengan demikian, penguatan pelaksanaan SPIP secara menyeluruh dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memperbaiki mutu laporan keuangan daerah serta memperkuat tata kelola keuangan publik yang transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; kualitas laporan keuangan, maturitas SPIP; opini BPK; akuntabilitas publik*

Abstract

Government financial statements play a strategic role in ensuring transparency and accountability in public financial management. However, audit findings by the BPK continue to reveal weaknesses in internal control systems and non-compliance with regulations, which negatively affect the quality of local government financial reports. This study aims to examine the influence of the Government Internal Control System (SPIP) implementation on financial statement quality, identify supporting and inhibiting factors, and analyze the relationship between SPIP maturity levels and BPK audit opinions. Using a Systematic Literature Review (SLR) with a qualitative descriptive approach, this study analyzes ten scientific articles and official reports published between 2020 and 2025. The findings indicate that effective SPIP implementation positively contributes to improving financial statement quality, particularly in relevance, reliability, and fair presentation. Its effectiveness is influenced by staff competence,

leadership commitment, organizational culture, and information technology utilization. Higher SPIP maturity levels are also associated with the achievement of an Unqualified Opinion (WTP) from BPK.

Keywords: *Government Internal Control System (SPIP); financial statement quality; SPIP maturity level; BPK audit opinion; public accountability*

Copyright (c) 2026 Lativa Yuswanita

✉ Corresponding author :

Email Address : lativayuswanita@politala.ac.id

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Melalui laporan tersebut, publik, lembaga legislatif, serta lembaga pengawasan dapat menilai sejauh mana pemerintah mengelola keuangan publik secara efisien, efektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan yang berkualitas menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlaili et al. (2025) menegaskan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Sejalan dengan itu, Mardiasmo (2020) menyatakan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai media utama dalam mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban publik, karena di dalamnya tercermin bagaimana pemerintah mengelola dana masyarakat secara ekonomis, efisien, dan berlandaskan prinsip *good governance*.

Pemerintah Republik Indonesia (2010) menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan harus disusun dengan memenuhi empat karakteristik utama, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Menurut Halim & Kusufi (2021), laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan publik, perencanaan anggaran, dan alokasi investasi daerah.

Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (2021) menunjukkan adanya peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian, masih terdapat sebagian pemerintah daerah yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Kondisi tersebut disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan (2023) kembali menyoroti berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi barang dan jasa, serta pengelolaan hibah yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas sistem pengendalian intern masih menjadi persoalan mendasar yang perlu diperkuat guna meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sebagai respon atas hal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia (2008) mengatur tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP dirancang untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan pelaporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. SPIP terdiri atas

lima unsur pokok, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan.

Secara konseptual, berdasarkan teori keagenan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sistem pengendalian intern berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi ketimpangan informasi antara pihak yang memberi dan menerima mandat. Mekanisme ini juga berperan dalam mencegah terjadinya penyimpangan serta memperkuat kepercayaan publik terhadap keandalan laporan keuangan pemerintah. Penerapan SPIP yang berjalan efektif diharapkan mampu meningkatkan mutu laporan keuangan daerah, khususnya dalam hal relevansi, keandalan, dan penyajian yang wajar, sekaligus mendukung pencapaian opini audit yang lebih baik.

Hasil sejumlah penelitian memperlihatkan adanya variasi dalam efektivitas penerapan SPIP terhadap mutu laporan keuangan pemerintah daerah. Amelia & Halim (2021) menemukan bahwa implementasi SPIP yang optimal berkontribusi nyata terhadap peningkatan keandalan laporan keuangan melalui pengurangan kesalahan dan penguatan akuntabilitas pelaporan. Namun, Riana Mayasari (2022) menunjukkan bahwa pengaruh SPIP di beberapa daerah masih belum signifikan karena penerapannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses penyusunan laporan serta lemahnya komitmen manajemen dan kompetensi sumber daya manusia.

Penelitian oleh Danari & Nugraha (2024) mengungkap bahwa penerapan SPIP dan kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan meskipun pemanfaatan teknologi informasi belum memberikan kontribusi besar. Temuan serupa dikemukakan oleh Yuditiya et al. (2023) bahwa kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, serta penerapan SPIP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

Penelitian lain oleh Natanael & Jamaris (2023) menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kompetensi SDM, dan SPIP secara simultan berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sementara itu, Silalahi et al. (2025) menemukan bahwa SPIP berperan signifikan dalam meningkatkan mutu laporan keuangan, dan pengaruhnya semakin kuat dengan dukungan akses informasi yang memadai. Hasil-hasil tersebut memperkuat pandangan bahwa efektivitas SPIP merupakan faktor utama dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Di sisi lain, penelitian Tingginehe et al. (2021) menunjukkan bahwa penerapan SPIP belum memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini terjadi karena SPIP masih diterapkan secara administratif dan belum diintegrasikan sepenuhnya dalam proses pengambilan keputusan. Fauzan et al. (2021) menambahkan bahwa lemahnya pengawasan internal berpotensi meningkatkan risiko kesalahan dan kecurangan dalam pelaporan keuangan. Sementara itu, penelitian (Yuswanita et al., 2020) menyoroti pentingnya sinergi antara sistem informasi, sistem pengendalian intern, dan pemahaman terhadap regulasi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan aset daerah, di mana kualitas aparatur daerah berperan sebagai variabel moderasi.

Hasil penelitian terbaru turut memperkuat hubungan antara efektivitas SPIP dan kualitas laporan keuangan. Indriyani & Ahmad (2023) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh efektivitas SPIP, kompetensi SDM, dan kepatuhan terhadap SAP. Fitriani et al. (2021) juga menegaskan

pentingnya sistem pengendalian intern dan kapasitas aparat desa dalam menentukan kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Indasari et al. (2025) menambahkan bahwa penerapan SPIP, sistem keuangan desa (SISKEUDES), dan kompetensi SDM secara simultan meningkatkan kualitas laporan keuangan desa.

Selain itu, Naida (2024) menggarisbawahi bahwa optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan SPIP akan efektif apabila didukung oleh peningkatan kompetensi SDM. Sementara Fatimah et al. (2021) menekankan bahwa kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dan tingkat kepatuhan terhadap peraturan keuangan.

Untuk mengatasi perbedaan temuan empiris tersebut, diperlukan penelitian kualitatif berbasis studi literatur yang dapat menyintesis hasil-hasil penelitian sebelumnya. Pendekatan ini tidak hanya memungkinkan pemetaan hubungan antara SPIP dan kualitas laporan keuangan, tetapi juga mengungkap faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas SPIP di lingkungan pemerintahan daerah Indonesia. Studi literatur yang dilakukan oleh Siringoringo et al. (2023) menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menemukan hubungan positif antara SPIP dan kualitas laporan keuangan, meskipun integrasi variabel moderasi seperti budaya organisasi dan kapasitas audit internal masih terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk memperkuat dasar teoretis dan praktis terkait penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah. Kajian ini mencakup periode 2020–2025 dengan tujuan utama untuk: (1) menganalisis pengaruh penerapan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah; (2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat efektivitas SPIP, seperti komitmen manajemen, pengawasan internal, dan kompetensi SDM; (3) menilai sejauh mana SPIP berkontribusi terhadap peningkatan relevansi, keandalan, dan penyajian laporan keuangan yang wajar; serta (4) mengkaji hubungan antara tingkat maturitas SPIP dan opini audit yang diberikan oleh BPK.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan metode kualitatif deskriptif, karena pendekatan ini memungkinkan identifikasi, evaluasi, dan sintesis secara sistematis terhadap bukti empiris dari berbagai penelitian terdahulu secara transparan dan objektif.

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang mencakup artikel ilmiah, buku akademik, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah dan profesional, khususnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data dikumpulkan melalui portal publikasi ilmiah terpercaya seperti Google Scholar, Scopus, DOAJ, Garuda, dan SINTA, menggunakan kata kunci “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” dan “kualitas laporan keuangan pemerintah daerah”. Rentang waktu publikasi literatur dibatasi pada lima tahun terakhir (2020–2025) agar temuan penelitian tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik pengelolaan keuangan pemerintah saat ini.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap utama. Pertama, reduksi data, yaitu proses penyaringan dan penyederhanaan informasi dari literatur sehingga hanya aspek-aspek yang relevan dengan efektivitas SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dianalisis. Kedua, penyajian data, berupa narasi deskriptif dan tabel untuk menyampaikan temuan penelitian secara sistematis dan mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu tahap

interpretasi data untuk memperoleh pemahaman mendalam dan menjawab tujuan penelitian secara komprehensif. Dengan demikian, metode penelitian ini memungkinkan sintesis temuan-temuan terdahulu secara menyeluruh dan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis dalam memahami hubungan antara SPIP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelusuran Literatur

Penelusuran literatur pada penelitian ini dilakukan terhadap sepuluh artikel ilmiah yang relevan dengan topik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dengan rentang publikasi tahun 2020 hingga 2025. Sumber literatur mencakup jurnal nasional dan internasional, laporan resmi, serta menggunakan metodologi kualitatif, kuantitatif, maupun campuran (Hariani & Fakhrorazi, 2021; Jannah & Ishak, 2023; Heinrich & Probohudono, 2023; Damanik et al., 2022; Anggreni et al., 2024; Indriyani & Ahmad, 2023; Fitriani et al., 2021; Indasari et al., 2025; Indasari et al., 2025; Naida, 2024).

Hasil penelitian literatur menunjukkan bahwa penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara umum berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SPIP berperan penting dalam meningkatkan relevansi, keandalan, serta penyajian laporan keuangan yang wajar, terutama apabila didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan yang efektif, dan pemanfaatan teknologi informasi (Heinrich & Probohudono, 2023; Damanik et al., 2022; Anggreni et al., 2024; Indasari et al., 2025). Beberapa penelitian menegaskan bahwa efektivitas SPIP juga dipengaruhi oleh budaya organisasi dan komitmen manajemen, di mana implementasi yang formalistik atau administratif cenderung tidak berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. (Riana Mayasari, 2022; Tingginehe et al., 2021; Fauzan et al., 2021). Selain itu, literatur menunjukkan bahwa adanya faktor moderasi seperti komitmen organisasi dan aksesibilitas informasi dapat memperkuat hubungan antara SPIP dan kualitas laporan keuangan (Yuditiya et al., 2023; Naida, 2024).

Beberapa studi kuantitatif mengungkapkan bahwa SPIP bersama dengan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kualitas SDM secara simultan meningkatkan mutu laporan keuangan (Natanael & Jamaris, 2023; Indriyani & Ahmad, 2023; Fitriani et al., 2021) sementara penelitian lain menunjukkan variasi akibat tingkat internalisasi SPIP yang berbeda di setiap daerah. Contohnya, meskipun beberapa pemerintah daerah telah memiliki struktur SPIP, penerapannya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam pengambilan keputusan, sehingga risiko kesalahan dan kecurangan tetap muncul. Sementara itu, implementasi SPIP yang matang meningkatkan peluang pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menunjukkan korelasi positif antara tingkat maturitas SPIP dan penilaian kualitas laporan keuangan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021; Silalahi et al., 2025; Tingginehe et al., 2021; Fauzan et al., 2021).

Dari sintesis hasil penelitian literatur memperlihatkan empat temuan utama. Pertama, SPIP secara konsisten berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan apabila didukung faktor internal yang memadai (Hariani & Fakhrorazi, 2021; Indasari et al., 2025; Indriyani & Ahmad, 2023). Kedua, variasi hasil empiris terkait efektivitas SPIP muncul karena perbedaan internalisasi pengendalian, budaya

organisasi, dan pemanfaatan teknologi (Riana Mayasari, 2022; Tingginehe et al., 2021; Yuswanita et al., 2020). Ketiga, faktor-faktor moderasi seperti komitmen organisasi dan aksesibilitas informasi memperkuat pengaruh SPIP terhadap mutu laporan (Yuditiya et al., 2023; Naida, 2024; Danari & Nugraha, 2024). Keempat, SPIP yang diterapkan secara efektif berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan peluang pemerintah daerah memperoleh opini WTP dari BPK. (Silalahi et al., 2025; Natanael & Jamaris, 2023) Temuan-temuan ini menegaskan perlunya pendekatan sintesis tematik untuk memahami interaksi antara SPIP dan kualitas laporan keuangan secara komprehensif.

Pengaruh SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan telaah literatur, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbukti berperan signifikan dalam peningkatan mutu laporan keuangan pemerintah daerah. Mayoritas penelitian menemukan bahwa penerapan SPIP berkorelasi positif dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Misalnya, Siringoringo et al. (2023) menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar prosedur administratif, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme strategis yang memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Temuan ini didukung oleh (Hariani & Fakhrorazi, 2021; Jannah & Ishak, 2023) yang menunjukkan bahwa efektivitas SPIP sangat dipengaruhi oleh kompetensi SDM dan komitmen organisasi. Penelitian oleh Silalahi et al. (2025) memperkuat temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa kemudahan akses informasi turut memperkuat pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya pada instansi seperti Disperindag NTT, di mana ketersediaan informasi yang cepat dan akurat menjadi penunjang keputusan keuangan yang tepat. Senada dengan hal ini, Matondang et al. (2025) menekankan bahwa penerapan SPIP secara optimal dapat dijadikan strategi utama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah turut meningkat. Hasil penelitian oleh (Indriyani & Ahmad, 2023; Fitriani et al., 2021; Indasari et al., 2025) juga menunjukkan bahwa SPIP yang didukung oleh kompetensi SDM dan kepatuhan terhadap SAP memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferlia et al. (2023) menemukan bahwa SPIP, bersama dengan akuntabilitas dan transparansi, secara bersamaan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, dengan SPIP menjadi variabel yang paling dominan. Hasil ini menegaskan bahwa SPIP berperan sebagai fondasi penting dalam menciptakan laporan keuangan yang andal, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan (Anggreni et al., 2024; Damanik et al., 2022; Naida, 2024).

Namun, beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda, Tingginehe et al. (2021) melaporkan bahwa SPIP tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di sejumlah SKPD Kabupaten Kepulauan Talaud. Meskipun struktur SPIP telah terbentuk secara formal, pelaksanaannya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan, sehingga efektivitasnya terbatas dan belum mampu secara optimal meningkatkan kualitas laporan keuangan di wilayah tersebut. Hal serupa juga ditemukan oleh (Fauzan et al., 2021; Riana Mayasari, 2022), yang menekankan pentingnya integrasi SPIP, kualitas aparatur, dan komitmen manajemen untuk memastikan pengendalian internal dapat meningkatkan mutu laporan keuangan.

Dengan kata lain, hasil sintesis literatur menegaskan bahwa efektivitas SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan sangat bergantung pada sejauh mana sistem ini diinternalisasi, didukung oleh pimpinan, dilengkapi kompetensi SDM, serta didukung pemanfaatan teknologi dan informasi. Sebaliknya, SPIP yang hanya diterapkan secara formalistik cenderung kurang berdampak, bahkan pada beberapa kasus tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi SPIP

Efektivitas SPIP dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan prosedur formal, tetapi sangat dipengaruhi oleh faktor internal yang mendukung atau menghambat pelaksanaannya. Salah satu faktor kunci adalah kompetensi sumber daya manusia, di mana SDM yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai mampu menjalankan pengelolaan dan pengawasan pengendalian intern secara efektif, sehingga turut meningkatkan keandalan dan mutu laporan keuangan (Yuditiya et al., 2023; Natanael & Jamaris, 2023; Indriyani & Ahmad, 2023; Indasari et al., 2025; Naida, 2024).

Selain kompetensi SDM, kepemimpinan transformasional dan komitmen pimpinan juga menjadi faktor penting dalam efektivitas SPIP. Pimpinan yang proaktif dalam mendorong penerapan SPIP serta menanamkan budaya pengendalian intern yang kuat akan memperkuat kinerja sistem, sehingga seluruh proses pengelolaan keuangan dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Danari & Nugraha, 2024; Ibrahim et al., 2024; Amelia & Halim, 2021).

Faktor lain yang mendukung efektivitas SPIP adalah penggunaan teknologi informasi dan kemudahan akses data. Dengan adanya sistem informasi yang memadai, proses pengawasan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan lebih cepat, akurat, serta mudah dijangkau, sehingga membantu pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Silalahi et al., 2025; Matondang et al., 2025; Anggreni et al., 2024).

Di sisi lain, efektivitas SPIP dapat terhambat oleh penerapan yang bersifat formal atau administratif tanpa diinternalisasi dalam pengambilan keputusan, budaya organisasi yang kurang mendukung, serta komitmen pimpinan yang rendah. Kondisi ini menjelaskan mengapa beberapa studi menemukan bahwa SPIP tidak selalu berdampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Tingginehe et al., 2021; Fauzan et al., 2021; Riana Mayasari, 2022; Yuswanita et al., 2020; Fitriani et al., 2021). Oleh karena itu, keberhasilan SPIP sangat ditentukan oleh keseimbangan antara faktor pendukung dan penghambat dalam lingkungan organisasi.

Efektivitas SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Pelaksanaan SPIP yang efektif terbukti memberikan kontribusi penting terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peningkatan tersebut paling nyata terlihat pada aspek relevansi, di mana laporan keuangan menyajikan informasi yang akurat, tepat, dan bermanfaat bagi pengambil keputusan, sehingga proses perencanaan dan pengambilan kebijakan dapat berjalan lebih efektif (Siringoringo et al., 2023; Indriyani & Ahmad, 2023).

Kedua, aspek keandalan menitikberatkan pada penyusunan laporan keuangan yang tepat dan terbebas dari kesalahan yang signifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ibrahim et al., 2024; Fauzan et al., 2021; Yuditiya et al., 2023) mengindikasikan bahwa penerapan SPIP secara terstruktur mampu meminimalkan

terjadinya kekeliruan material, sehingga laporan keuangan dapat dipercaya dan digunakan secara lebih andal oleh para pemangku kepentingan. Temuan serupa juga diungkapkan oleh (Natanael & Jamaris, 2023; Indasari et al., 2025) yang menekankan pentingnya sinergi antara SPIP, kompetensi SDM, dan kepatuhan terhadap SAP untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

Ketiga, prinsip penyajian yang wajar menuntut agar informasi dalam laporan keuangan disajikan secara konsisten, transparan, serta mudah dimengerti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, lembaga legislatif, dan badan pengawas. Penelitian (Danari & Nugraha, 2024; Silalahi et al., 2025; Matondang et al., 2025) turut menegaskan bahwa kejelasan dan keterpahaman dalam penyajian informasi merupakan faktor penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah. Selain itu, Fitriani et al. (2021) menekankan bahwa penyajian laporan keuangan yang sistematis juga membantu meningkatkan akuntabilitas aparat desa dan pemerintah daerah.

Selanjutnya, Natanael & Jamaris (2023) menyatakan bahwa efektivitas penerapan SPIP akan mencapai hasil yang lebih maksimal apabila didukung oleh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Fauzan et al. (2021), yang menemukan bahwa penerapan SPIP tidak hanya berperan dalam meningkatkan mutu laporan keuangan, tetapi juga membantu mengurangi potensi kesalahan pencatatan pada aset tetap, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPIP yang berjalan secara efektif berperan penting dalam menjamin bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun secara relevan, terpercaya, dan disajikan dengan cara yang wajar. Selain itu, penerapan tersebut turut memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan publik (Siringoringo et al., 2023; Indriyani & Ahmad, 2023; Silalahi et al., 2025).

Dampak Tingkat Maturitas SPIP terhadap Opini BPK

Tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terbukti memiliki hubungan yang signifikan dengan opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Daerah yang mampu mengimplementasikan SPIP secara optimal dan menyeluruh umumnya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang menandakan bahwa pengelolaan keuangannya telah dilakukan secara transparan, andal, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku (Siringoringo et al., 2023; Natanael & Jamaris, 2023).

Sebaliknya, pemerintah daerah yang menerapkan SPIP hanya sebatas formalitas atau belum mencapai tingkat kematangan yang optimal cenderung memiliki kemungkinan lebih besar memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Hal tersebut tercermin dalam laporan hasil pemeriksaan (Badan Pemeriksa Keuangan, 2021; Badan Pemeriksa Keuangan, 2023) serta penelitian (Tingginehe et al., 2021; Riana Mayasari, 2022) yang menunjukkan bahwa sejumlah pemerintah daerah dengan penerapan SPIP yang belum efektif mengalami kendala dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai standar.

Selain itu, penelitian oleh (Danari & Nugraha, 2024; Yuditia et al., 2023) menegaskan bahwa efektivitas SPIP yang didukung oleh kompetensi SDM, kepemimpinan transformasional, serta pemanfaatan teknologi informasi memperkuat kematangan sistem dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Temuan ini juga diperkuat oleh (Silalahi et al., 2025; Indriyani & Ahmad, 2023), yang menekankan bahwa tingkat maturitas SPIP yang optimal tidak hanya berpengaruh pada opini audit BPK, tetapi juga pada akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Dengan demikian, tingkat kematangan SPIP tidak hanya mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern dijalankan, tetapi juga menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan SPIP dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan daerah memiliki peran langsung dalam meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat kredibilitas pemerintah di hadapan masyarakat dan lembaga pengawas (Natanael & Jamaris, 2023; Siringoringo et al., 2023; Silalahi et al., 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah literatur dan berbagai temuan penelitian terkait Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dapat disimpulkan bahwa penerapan SPIP memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. SPIP yang dijalankan secara efektif mampu memperkuat aspek relevansi, keandalan, dan penyajian laporan keuangan yang wajar, sekaligus mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Selain itu, tingkat maturitas SPIP terbukti berkaitan erat dengan opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); semakin tinggi kematangan SPIP, semakin besar peluang pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sebaliknya, penerapan SPIP yang masih bersifat formalistik atau administratif berpotensi menurunkan kualitas pelaporan keuangan dan mengakibatkan opini yang kurang baik, seperti Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Menyatakan Pendapat (TMP).

Dari sisi teoritis, hasil penelitian ini memperkuat relevansi *agency theory* dan *good governance theory* dalam konteks sektor publik. Penerapan SPIP berperan sebagai mekanisme pengendalian yang mampu mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, sehingga mendorong terciptanya tata kelola keuangan yang efisien, transparan, dan dapat dipercaya. Dari sisi praktis atau manajerial, hasil ini menunjukkan pentingnya peran pimpinan dan sumber daya manusia dalam memperkuat pelaksanaan SPIP. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa SPIP tidak hanya bersifat administratif, melainkan diinternalisasikan dalam seluruh proses pengelolaan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi aparatur, serta komitmen pimpinan menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi SPIP yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena didasarkan pada kajian literatur dan hasil penelitian sebelumnya, tanpa pengujian empiris langsung terhadap variabel-variabel yang diteliti. Beberapa penelitian terdahulu juga cenderung berfokus pada pendekatan kuantitatif deskriptif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan dinamika penerapan SPIP di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian di masa mendatang disarankan untuk melakukan studi empiris lintas

daerah dengan memperhatikan variasi tingkat maturitas SPIP. Pendekatan campuran (mixed methods) juga dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, dengan mempertimbangkan faktor moderasi seperti budaya organisasi, komitmen pimpinan, dan dukungan teknologi informasi

Referensi :

- Amelia, D., & Halim, A. (2021). EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA Penyusunan Laporan Keuangan Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sleman. *BAJ (Behavioral Accounting Journal)*, 4(1), 323–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.33005/baj.v4i1.133>
- Anggreni, N. L. N. A. G., Suryandari, N. N. A., & Hartini, M. L. S. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Di Kabupaten Gianyar. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 6(3), 570–586. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/10544>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2021*. <https://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023a). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023*. <https://www.bpk.go.id>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2023b). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 (IHPS II/2023)*. https://www.bpk.go.id/assets/files/ihps/2023/II/ihps_ii_2023_1717472808.pdf
- Damanik, D. L. D., Muda, I., & Kholis, A. (2022). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Di Wilayah Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 12–25. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i1.48>
- Danari, C. P., & Nugraha, A. A. (2024). Pengaruh SPIP, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada OPD Pemerintah Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 4(3), 213–223. <https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/5175>
- Fatimah, S., Alam, S., & Hamzah, M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 2(1), 104–113. <https://e-jurnal.stienobel-indonesia.ac.id/index.php/JMMNI/index>
- Fauzan, A. D., Supriatna, I., & Hastuti. (2021). Pengaruh Implementasi SPIP terhadap Penatausahaan Aset Tetap serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat). *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(3), 528–535. <https://jurnal.polban.ac.id/iarj/article/view/3056>
- Ferlia, T. M., Setyowati, S. W., Retnasari, A., & Irianto, M. F. (2023). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus pada BKAD Kabupaten Malang). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(2), 45–56. <https://doi.org/10.59837/jan.v1i2.9>
- Fitriani, D., Masitoh, E., & Siddi, P. (2021). Analisis Determinan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa Di Wilayah Kecamatan Laweyan Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(02)(71), 876. <https://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/4344>
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Salemba Empat.
- Hariani, S., & Fakhrorazi, A. (2021). *Determinants of Financial Reporting Quality: An Empirical*

- Study Among Local Governments In Indonesia.* 8055, 167-186. <https://doi.org/10.34109/ijefs>.
- Heinrich, A., & Probohudono, A. N. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(2), 411-424. <https://doi.org/10.24002/konstelasi.v3i2.7150>
- Ibrahim, S. D., Tuli, H., & Mahmud, M. (2024). Analisis Sistem Pengendalian Internal dalam Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(2), 412-423. <https://jamak.fe.ung.ac.id/index.php/jamak/article/view/123>
- Indasari, M. N., Sulisty, S., & Yogivaria, D. W. (2025). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(3), 1-6. <https://doi.org/10.59837/jan.v2i3.386>
- Indriyani, A. T., & Ahmad, A. (2023). Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 505-520. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam/article/view/8245>
- Jannah, A. R., & Ishak, J. F. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. *Indonesian Accounting Research ...*, 3(2), 202-211. <https://doi.org/https://doi.org/10.35313/iarj.v3i3.5201>
- Mardiasmo. (2020). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Matondang, K., Lubis, Z. H., Fajri, M. Y., Bella, S., & Simanungkalit, B. M. (2025). Peran Sistem Pengendalian Internal dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan di Kota Medan. *Journal of Law, Education and Business*, 3(1), 466-372. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i1.5798>
- Naida, N. (2024). Optimalisasi SIPD dan SPIP dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan: Pentingnya Kompetensi SDM. *Solusi*, 22(4), 465-479. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i4.10554>
- Natanael, Y. A., & Jamaris, E. (2023). *Pengaruh Penerapan SAP, Kualitas SDM, Penerapan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.* 2(2). <https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jak%0APengaruh>
- Nurlaili, F., Ilmi, Y. F., & Maharani, E. (2025). *Literature Review Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* 4(2), 28-39. <https://doi.org/10.61252/fluralis.v4i2.226>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).* https://peraturan.bpk.go.id/Details/4876?utm_source=chatgpt.com
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.* <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39224/pp-no-71-tahun-2010>
- Riana Mayasari. (2022). Lemahnya Signifikansi Sistem Pengendalian Internal untuk Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 6(1), 113-122. <https://doi.org/10.33795/jraam.v6i1.011>
- Silalahi, E. E., Manu, R. R., & Data, A. (2025). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Journal Economic Education, Business and Accounting*, 4(1), 335-346. <https://doi.org/10.35508/jeeba.v4i1.19544>
- Siringoringo, V. R., Fadhilah, U. A., Rizal, M., & Ervinasari, B. (2023). Peran Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Literatur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 38-46.

- <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/ijess/article/view/35>
- Tingginehe, S. M., Andreas, H. H., & Marwata. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Kasus pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 1352-1359. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/33040>
- Yuditiya, A. I., Rahayu, S., & Tiswiyanti, W. (2023). Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Jambi: Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 11(2), 197. <https://doi.org/10.29103/jak.v11i2.12253>
- Yuswanita, L., Basri, Y. M., & Nasrizal. (2020). The Influence of Information System, Internal Control System, and Understanding Regulation on The Effectiveness of Regional Asset Management, with The Quality of Regional Aparatures as A Moderating Variables in Pekanbaru City Government. *International Journal of Economic, Business & Applications*, 4(2), 18-30. <https://doi.org/10.31258/ijeba.36>